



INFOGRAFIS PERKARA MALPRAKTIK DI INDONESIA



Bulan Oktober Tahun 2025

REGULASI TERKAIT

- **UU No. 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan: Menekankan perlindungan terhadap tenaga medis dan pasien, serta pentingnya penilaian profesional sebelum perkara masuk ranah hukum;
- **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024** tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

DASAR HUKUM

PENYELESAIAN PERKARA **PIDANA** MALPRAKTEK

- Perkara pidana malpraktik berfokus pada **kelalaian** atau **kesengajaan yang menyebabkan luka atau kematian**. Proses pidana terhadap dugaan malpraktik medis di Indonesia bergantung pada rekomendasi awal dari **MKDKI** (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia). Hal ini ditegaskan dalam **Pasal 308 ayat (1) UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023**, yang menyatakan bahwa sebelum dikenai sanksi pidana, tenaga medis harus terlebih dahulu dinilai oleh majelis yang berwenang.
- **Pasal 359 KUHP**: Kelalaian yang menyebabkan kematian
- **Pasal 360 KUHP**: Kelalaian yang menyebabkan luka berat
- **Pasal 351 KUHP**: Penganiayaan (jika ada unsur kesengajaan)

PENYELESAIAN PERKARA **PERDATA** MALPRAKTEK

- Perkara perdata bertujuan untuk menuntut kompensasi atas kerugian fisik, psikologis, atau finansial akibat yang dialami pasien atau keluarga korban kelalaian tenaga medis . Dasar hukum:
- **Pasal 1365 KUHPerdata**: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- **Pasal 1366 KUHPerdata**: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

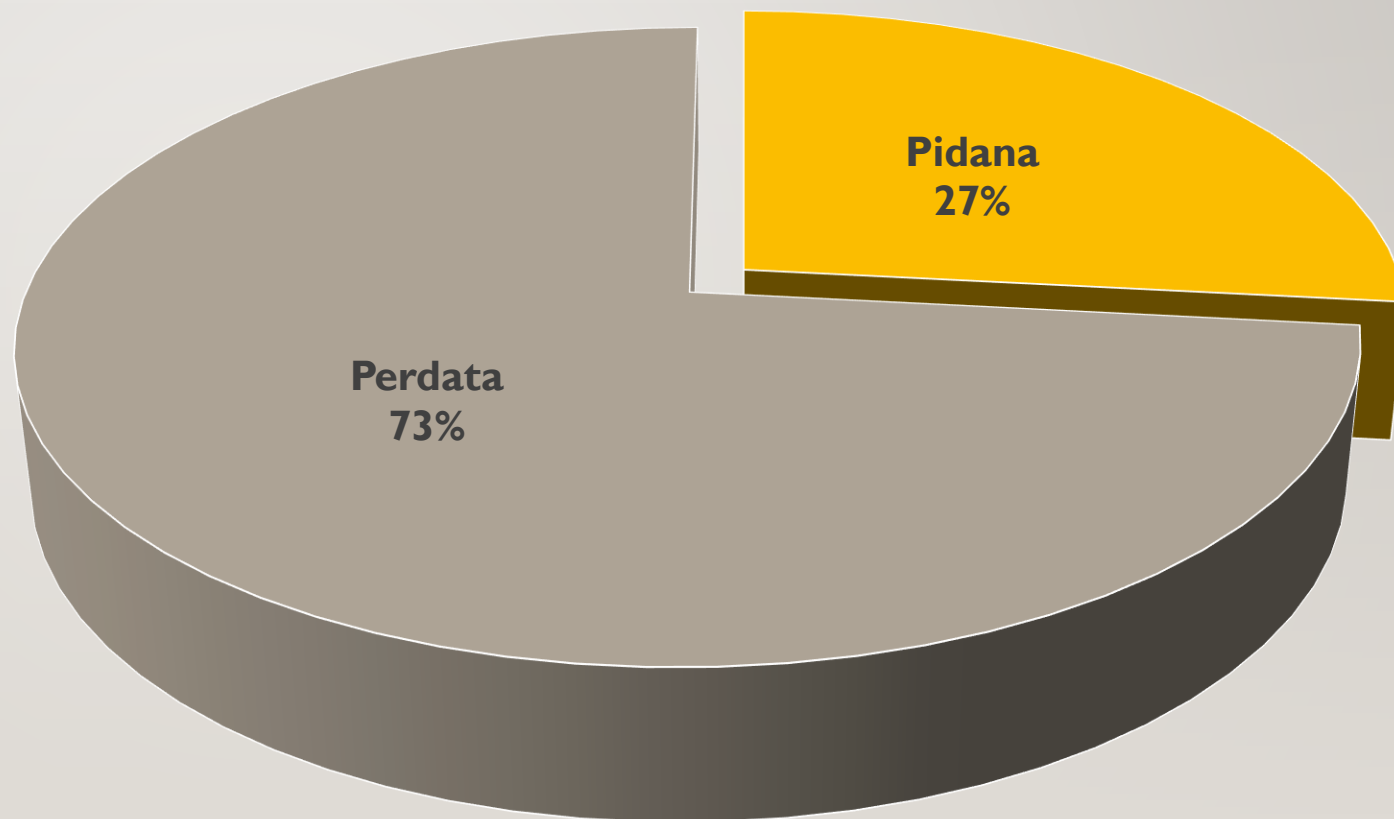
Mekanisme Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Indonesia

Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permenkes No. 3 Tahun 2025.

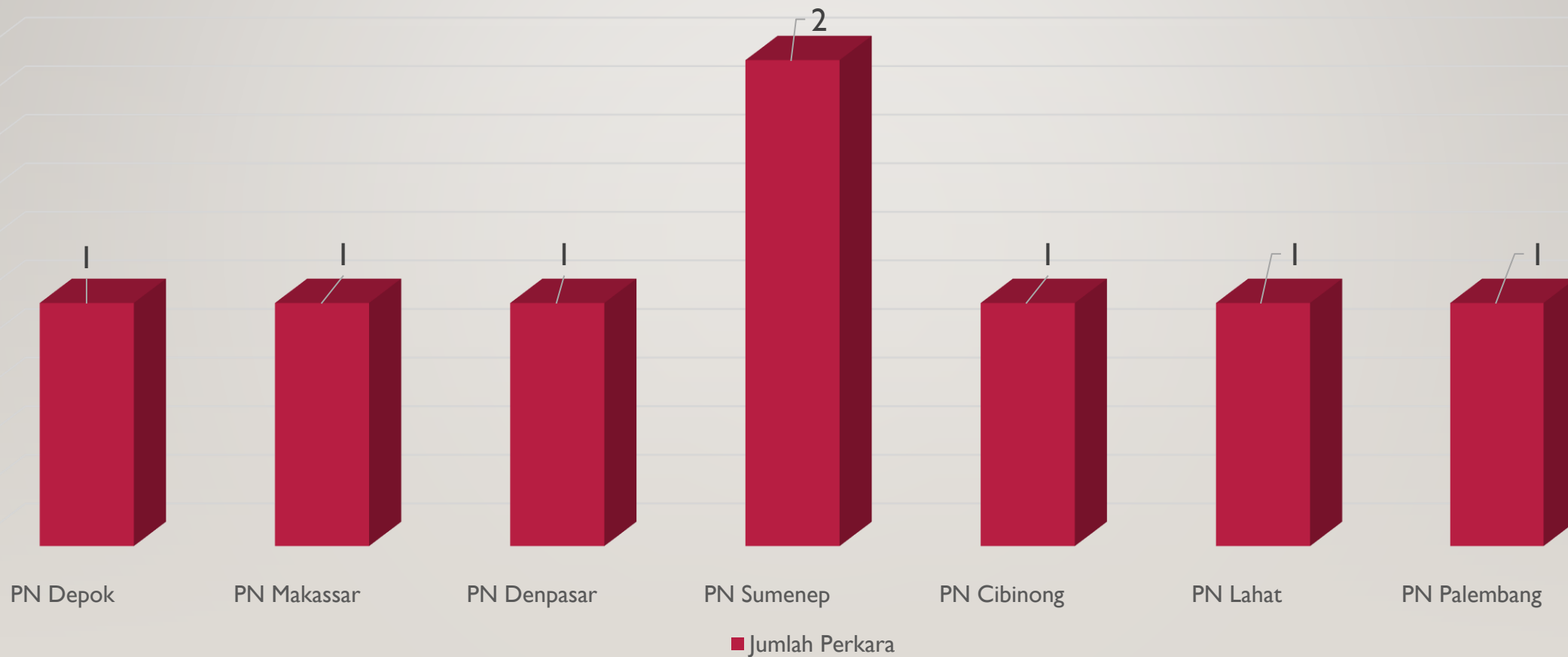


PERKARA MALPRAKTIK DI INDONESIA TAHUN 2009 - 2025

Tahun	Pidana	Perdata
2009	0	1
2010	0	1
2011	0	2
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	2
2015	0	2
2016	0	1
2019	1	2
2020	0	2
2021	0	1
2024	7	0
2025	0	3
Jumlah	8	22

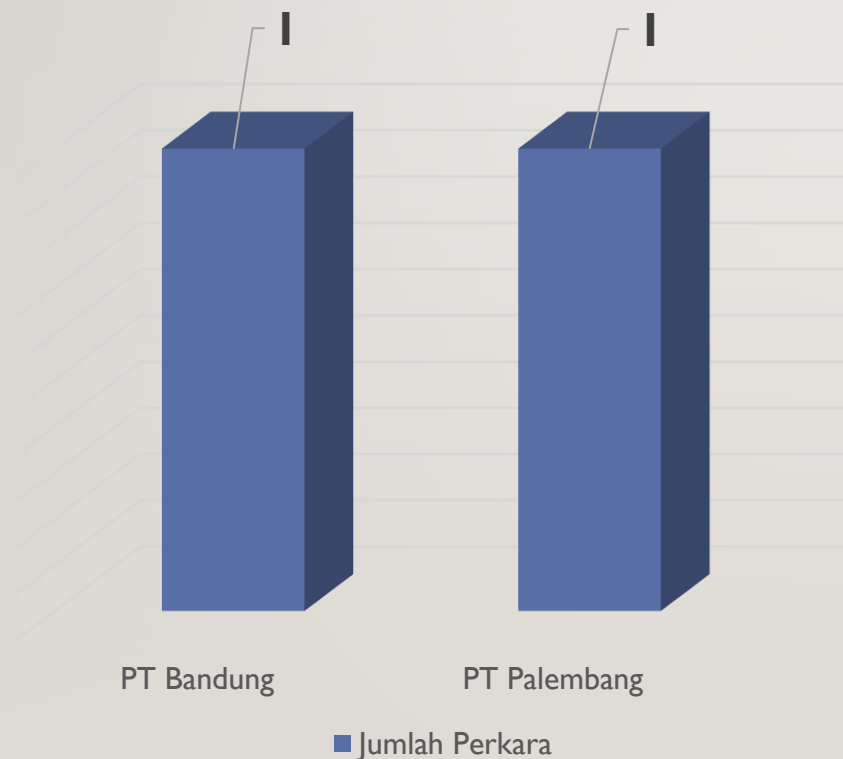


PERKARA PIDANA MALPRAKTEK PADA PENGADILAN NEGERI TAHUN 2009 - 2025

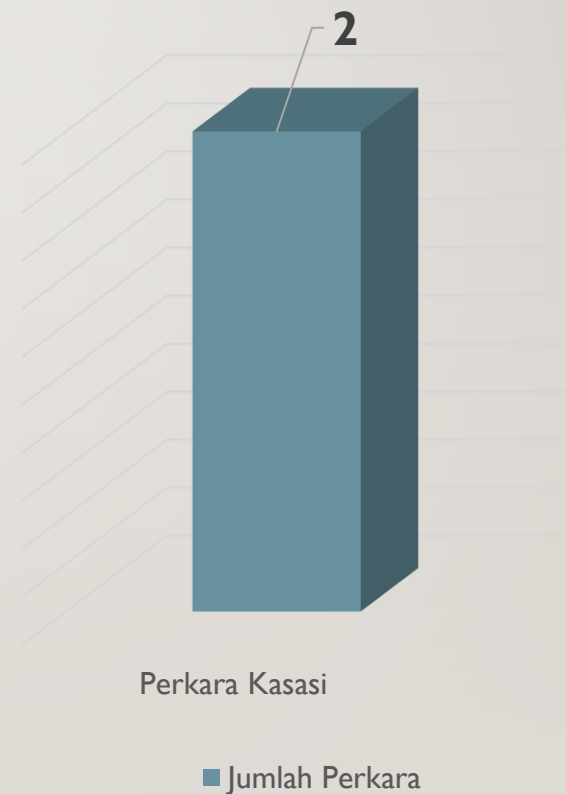


PERKARA PIDANA MALPRAKTEK YANG DIMOHONKAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI TAHUN 2009 - 2025

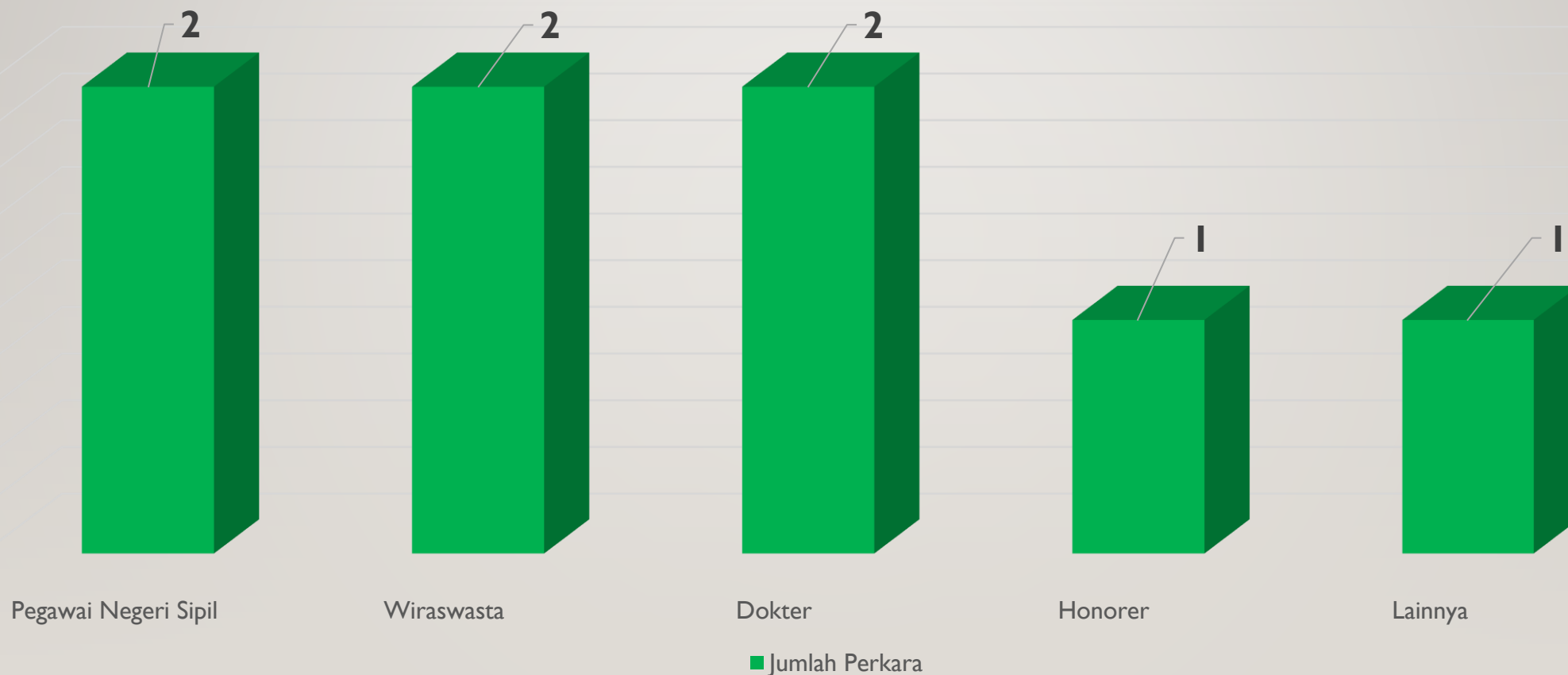
Jumlah Perkara Banding



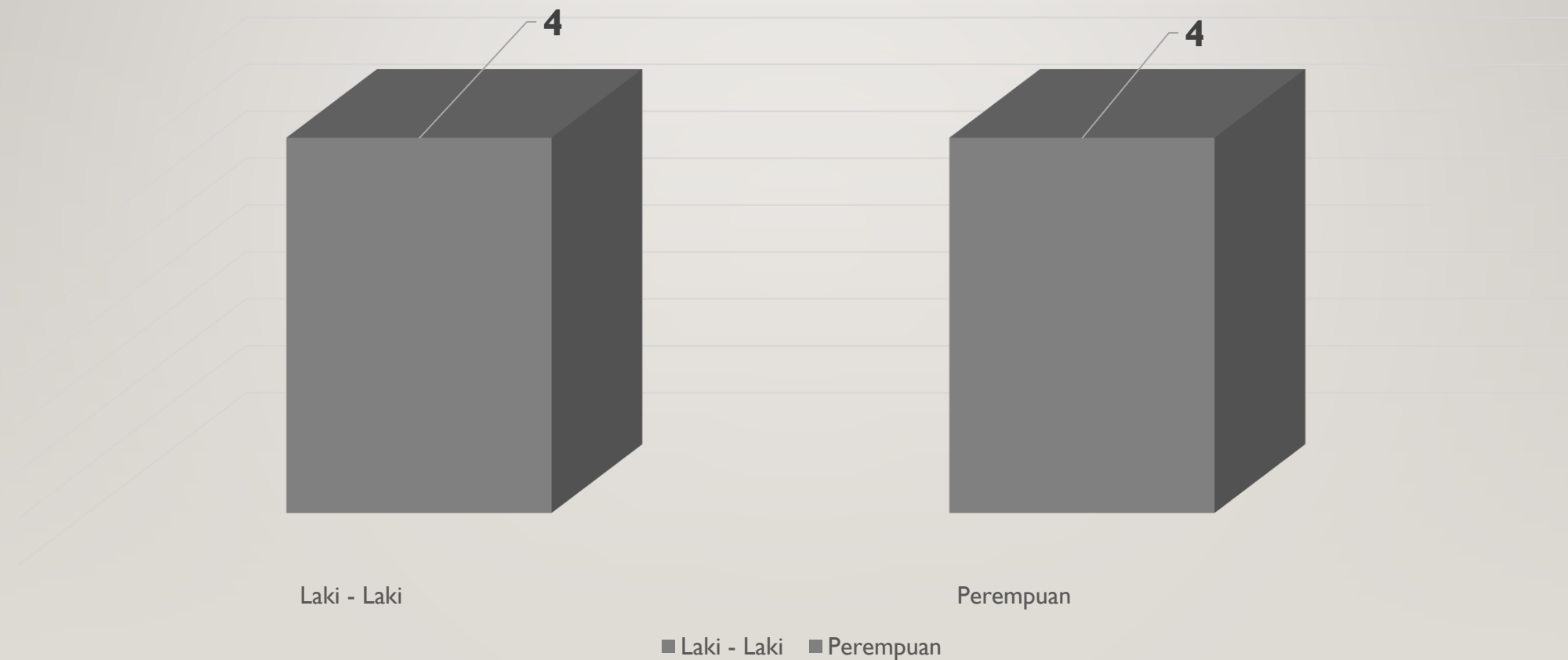
Jumlah Perkara Kasasi



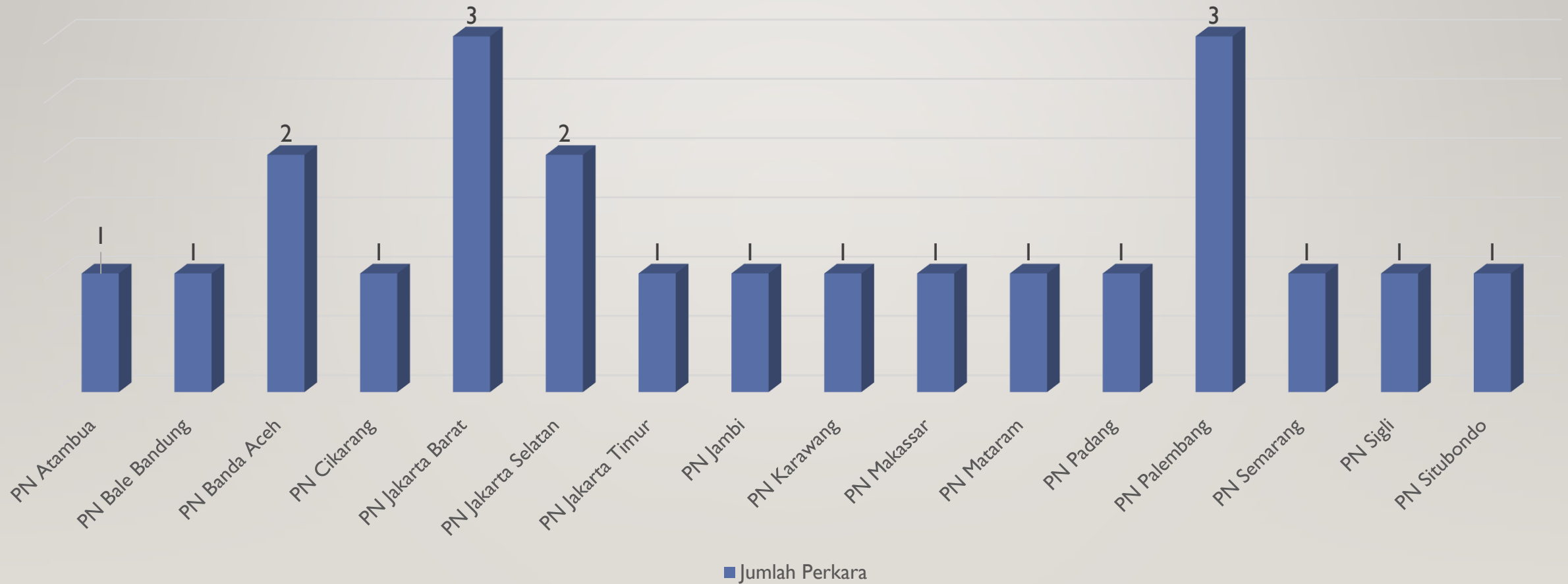
TERDAKWA PERKARA PIDANA MALPRAKTEK PADA PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PEKERJAAN TAHUN 2009 - 2025



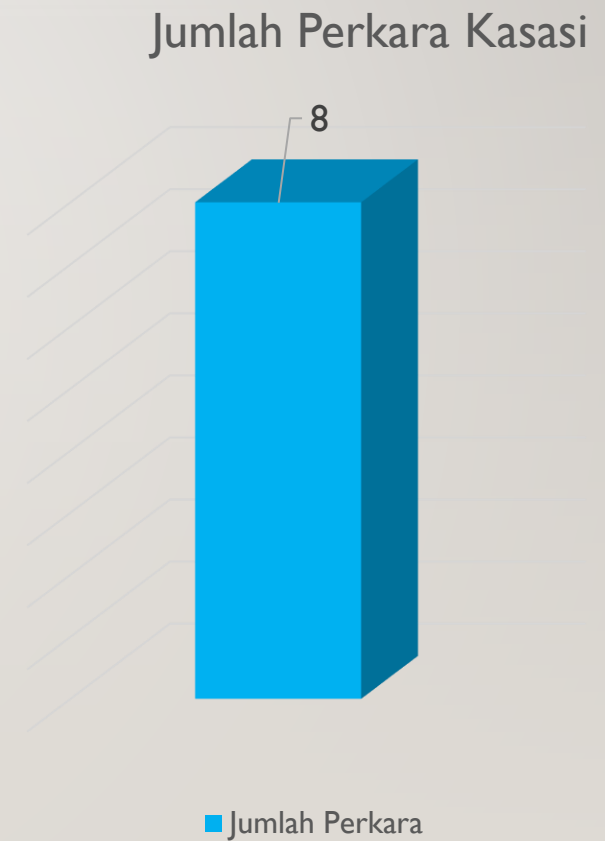
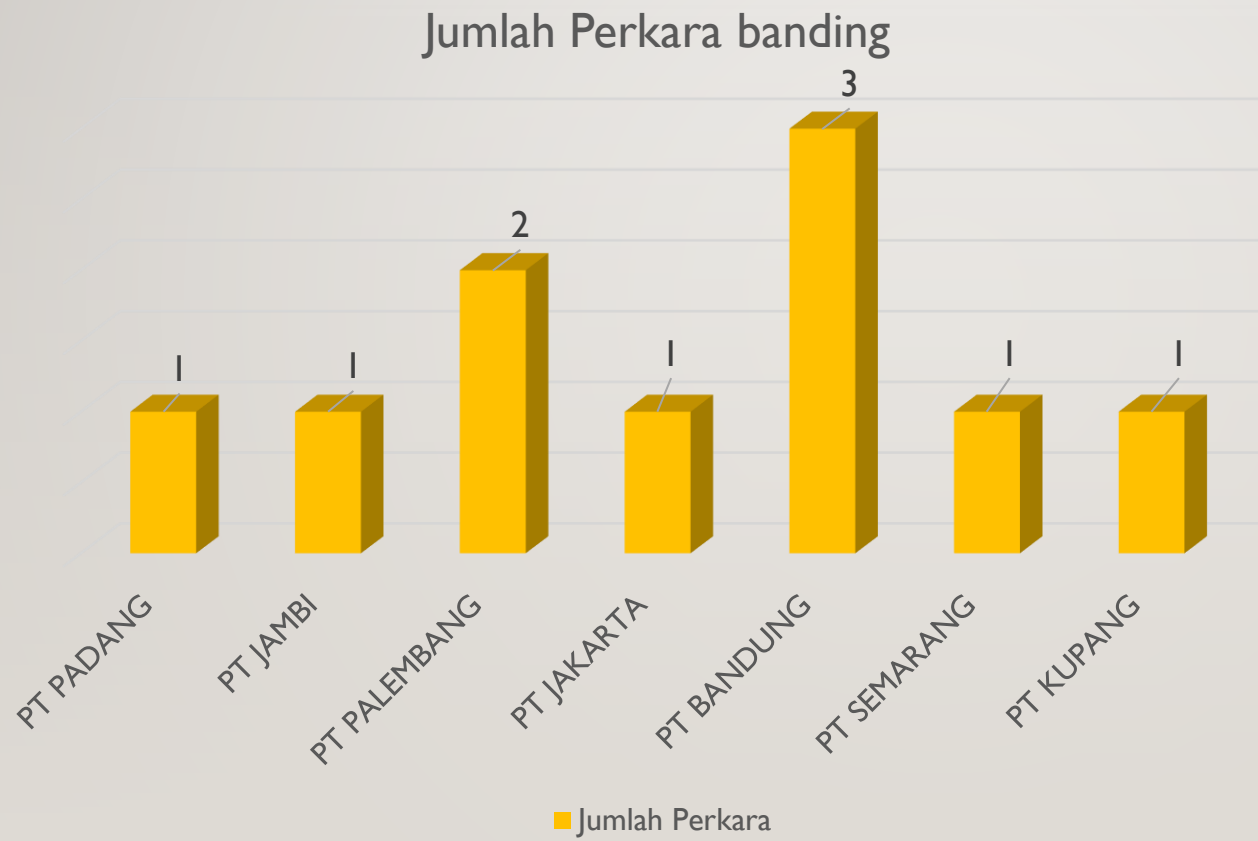
TERDAKWA PERKARA PIDANA MALPRAKTEK PADA PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2009 - 2025



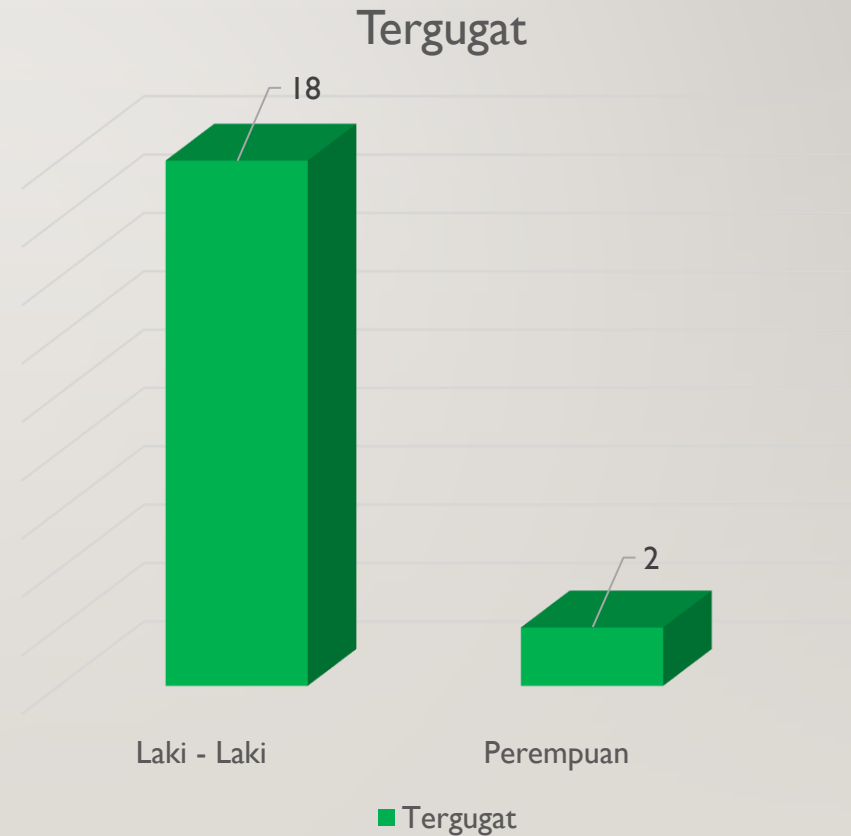
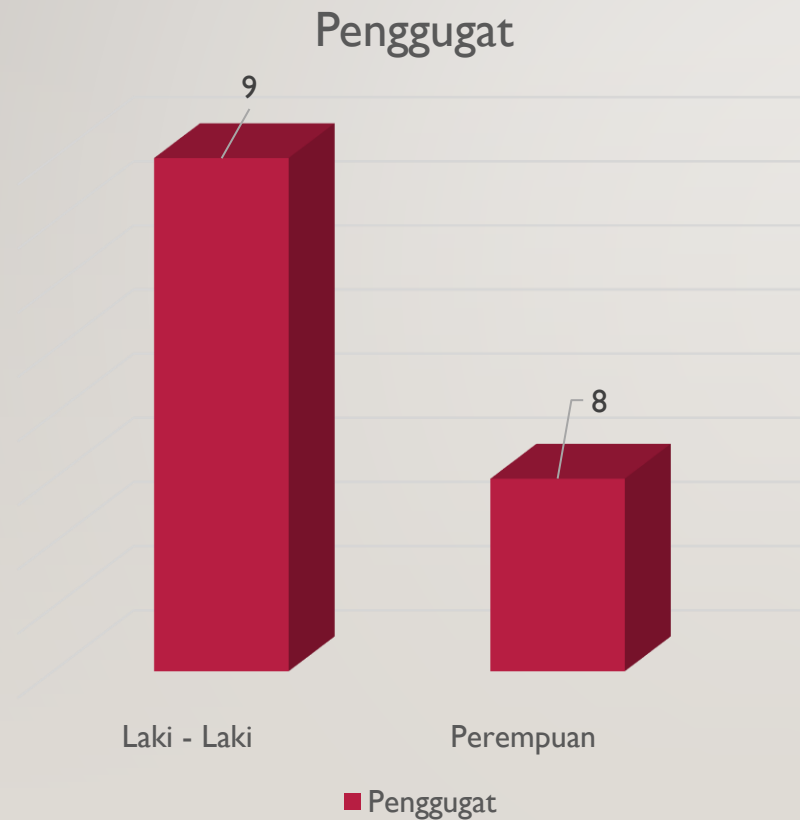
PERKARA PERDATA MALPRAKTEK PADA PENGADILAN NEGERI TAHUN 2009 - 2025



PERKARA PERDATA MALPRAKTEK YANG DIMOHONKAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI TAHUN 2009 - 2025



PIHAK DALAM PERKARA PERDATA MALPRAKTEK BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2009 - 2025



PIHAK DALAM PERKARA PERDATA MALPRAKTEK BERDASARKAN PEKERJAAN TAHUN 2009 - 2025

